

Pertukaran Sosial: Studi Tentang Tata Kelola Air di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Social Exchange: Study of Water Management on Ampelan Village Wringin Sub-District Bondowoso District

Oleh: Yhurika Prastika¹, Hary Yuswadi².

¹Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Jember, Jember, 68121, Indonesia.

²Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Jember, Jember, 68121, Indonesia.

Email: Yhurikaprastika60@gmail.com

Abstract

This research focuses on the practice of social exchange that occurs in water management to maintain the ulu-ulu position. It focuses on one village that has a scarcity of water resources. Researchers use the phenomenological method. Informants are determined using purposive, with the criteria that informants are directly involved with water management and have experience with clean water in Ampelan for at least two years. The technique of collecting data was carried out by observation, in-depth interviews, and documentation. The data validity test used the triangulation technique. The analysis technique used an interactive model by Miles and Huberman. As a reference for analyzing facts in the field, it is framed with the social exchange theory of George C. Homans. The analysis results show the manufacture of reservoirs at the spring and piping managed by the appointed management, namely ulu-ulu, with the organization of the HIPPAM organization. There are weaknesses in water management in Ampelan Village, such as unclear management recruitment, unclear organizational structure, and unclear benefit sharing. It encourages the ulu-ulu to feel like they have water resources and turn water resources into commodities so that they manage water at will, causing seizure of territory and internal conflicts. Ulu-ulu cannot work in groups and run individually so that weaknesses in governance reinforce exchanges between ulu-ulu and consumers and fellow ulu-ulu. So, there are exchanges carried out in authority, namely the exchange of water with social support, the exchange of water with kinship, and the exchange of water with privileges in society.

Keywords: social exchange, water governance, pipeline, source commodity water power.

*Corresponding author.

Email: Yhurikaprastika60@gmail.com



Abstrak

Penelitian ini berfokus pada praktik pertukaran sosial yang terjadi dalam tata kelola air untuk mempertahankan posisi ulu-ulu. Lebih mikro dan fokus pada satu desa yang memiliki kelangkaan sumber daya air. Peneliti menggunakan metode fenomenologi. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive dengan kriteria informan yang terlibat langsung dengan tata kelola air, dan memiliki pengalaman seputar air bersih di desa Ampelan selama minimal dua tahun. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Sebagai acuan untuk menganalisis fakta-fakta di lapangan, maka dibingkailah dengan teori pertukaran sosial George C. Homans. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa terdapat pembuatan tandon pada sumber mata air dan pipanisasi yang dikelola oleh pengurus yang telah ditunjuk yaitu ulu-ulu dengan wadah organisasi HIPAM. Terdapat kelemahan dalam tata kelola air di Desa Ampelan seperti ketidakjelasan rekrutmen pengurus, ketidakjelasan struktur dalam organisasi, serta ketidakjelasan pembagian keuntungan. Hal tersebut mendorong ulu-ulu seolah merasa memiliki sumber daya air dan menjadikan sumber daya air menjadi komoditas, sehingga mengelola air dengan semaunya sehingga menyebabkan perebutan wilayah kekuasaan dan konflik internal. Ulu-ulu tidak dapat bekerja dalam kelompok dan berjalan secara individual, sehingga kelemahan dalam tata kelola tersebut menguatkan terjadinya pertukaran-pertukaran antara ulu-ulu dengan konsumennya maupun sesama ulu-ulu. Jadi, terjadi pertukaran-pertukaran yang dilakukan dalam tata kelola yaitu pertukaran air dengan dukungan sosial, pertukaran air dengan hubungan kekerabatan, dan pertukaran air dengan privilege dalam masyarakat.

Kata Kunci: pertukaran sosial, tata kelola air, pipanisasi, komoditas sumber daya air.



Pendahuluan

Air menjadi suatu kebutuhan vital bagi kehidupan masyarakat. Sumber air merupakan harta milik bersama. Merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik sehingga dapat menjamin pemerataan distribusi air yang lebih sistematis dan merata. Pentingnya air bagi sumber kehidupan tidak dapat digantikan dengan barang apapun. Sangat vitalnya masalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat, maupun kebutuhan pertanian, dan keperluan-keperluan sektor lain, membuka kemungkinan bahwa air menjadi komoditas yang strategis. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan alam men-*supply* air bersih, sedangkan tidak semua warga bisa menjangkau sumber-sumber air. Sebagaimana Islam dan Repella (2015) menulis bahwa manajemen pengelolaan air merupakan aspek penting dalam pengelolaan air. Dengan adanya manajemen yang baik masalah masalah pengelolaan air akan bisa diselesaikan salah satunya adalah menghadirkan air di dekat rumah penduduk. Demikian pula fenomena di Kabupaten Bondowoso yang sebagian wilayahnya merupakan dataran tinggi, yang relatif kering dan langka sumber air. Membuat air menjadi komoditi yang bernilai dalam melakukan pertukaran-pertukaran. Sejalan dengan hal tersebut, kittikhoun, A., Staubli, D.M., (2018) juga menyampaikan gagasan tentang diplomasi dalam pengelolaan air. Sementara itu, Safer Karima (2014) menulis tentang manajemen air dan pembangunan berkelanjutan, hal ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen air yang baik untuk mengelola dan mendistribusikan air secara adil untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Tahun 2003/2004 Desa Ampelan menerima APBD Provinsi untuk pembangunan tandon di sumber mata air. Program pipanisasi diawali dengan pembangunan tandon pertama pada Sumber Batu Putih, yang merupakan mata air terbesar yang berada diantara garis perbatasan Desa Ampelan dan Desa Gubrih, tandon tersebut disebar di Desa Ampelan. Pada tiap-tiap tandon dikelola oleh pengurus yang dipilih, yaitu *ulu-ulu* yang dinaungi oleh organisasi HIPPAM. Hingga tahun-tahun berikutnya pun dilakukan pembangunan tandon pada 3 Sumber mata air, 3 sumur bor, dan 1 sumber lainnya merupakan hasil pembangunan mahasiswa KKN Universitas Jember. Organisasi tata kelola air di Ampelan hanya berjalan ± 5 tahun, hal ini karena kelemahan-kelemahan yang ada didalam tata kelola air. Oleh sebab itu, banyak terjadi penyimpangan oleh *ulu-ulu* untuk memperebutkan wilayah kerja mereka,



hingga *ulu-ulu* menjadi berjalan masing-masing dan dengan aturan masing-masing *ulu-ulu*. Meskipun demikian, tata kelola air di Desa Ampelan tetap berjalan hingga 16 tahun lamanya. Hal ini karena *ulu-ulu* dan pengguna air bersihnya menemukan pertukaran-pertukaran dalam tata kelola air. Terkait fenomena yang sedang terjadi, peneliti mengambil penelitian yang berjudul Pertukaran Sosial: Studi Tentang Tata Kelola Air Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Pembahasan

Potret Tata Kelola Air di Desa Ampelan

1) Pembuatan Tandon dan Pipanisasi

Pembuatan tandon dan pipanisasi merupakan awal terbentuknya pembatasan pada penggunaan air bersih di sumber mata air. Berdasarkan data lapang, setiap tandon memiliki *ulu-ulu*, baik itu di tandon sumber mata air, maupun di tandon sumur bor. Peran *ulu-ulu* dalam hal ini ialah melayani masyarakat dalam penggunaan air bersih, dengan cara merawat tandon dan pipanisasi agar berjalan lancar dalam proses distribusinya. Siapapun yang ingin menggunakan air pipa harus membayar iuran kepada *ulu-ulu*, beberapa *ulu-ulu* juga menarik uang amprah dengan nominal 50.000 sampai 300.000 rupiah.

Sebagian pengguna air pipanisasi menganggap pembuatan tandon dan pipanisasi membatasi mereka dalam menggunakan air, yang mana biasanya warga bisa menikmati tanpa harus melalui *ulu-ulu*, kini mereka harus membayar uang amprah agar dapat mengakses air bersih. Selain itu tidak sedikit *ulu-ulu* yang berbuat kecurangan. Pembuatan tandon dan pipanisasi juga memunculkan strata sosial, pengguna yang mampu membayar bisa menikmati air cukup didalam rumah, sedangkan yang kurang mampu masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan airnya.

2) Pembayaran Iuran dan Ngamprah

Tata kelola air bersih seharusnya dijalankan dengan asas keadilan, yaitu tidak membedakan tingkat ekonomi, lokasi, maupun faktor sosial lainnya. Hal tersebut sebagaimana tertulis dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 yang berbunyi:



“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat”.

Pada kenyataannya, warga bisa menikmati air bersih dengan syarat-syarat tertentu, seperti harus membayar uang *ngamprah* ditambah membayar uang iuran setiap bulannya. Ketika warga pengguna membutuhkan air lebih banyak, seperti pada acara khitanan, pernikahan, dan keperluan irigasi lahannya, maka harus membayar lagi dengan besaran uang yang telah ditentukan oleh *ulu-ulu*. Besaran uang *ngamprah* yang harus dibayar oleh pelanggan mulai dari Rp. 50.000 sampai Rp. 300.000, setelah itu pelanggan masih dibebankan iuran perbulan dengan besaran yang berbeda pada tiap-tiap orang yaitu mulai dari Rp. 5000 sampai Rp. 25.000. Besaran biaya tersebut ditentukan oleh *ulu-ulu* secara pribadi, khususnya pada besaran uang *ngamprah*. Inilah kenapa dalam beberapa kondisi, air dilihat sebagai komoditi yang memiliki nilai tinggi, yang mana hal tersebut dipicu oleh keterbatasan tersedianya air bersih sehingga mengakibatkan oknum-oknum untuk memanfaatkan keadaan tersebut. Akhirnya warga miskin harus berjuang lebih keras untuk akses air bersih dan hal tersebut sangat menguras keuangan, fisik, dan kehidupan warga ekonomi lemah.

3) Syarat-syarat Bagi Konsumen Air Pipa

Masyarakat di Desa Ampelan terbiasa memanfaatkan sungai-sungai dalam kegiatan sehari-hari, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari selalu mengakses dari sumber air secara langsung dengan cara *nyo'on*. Warga boleh mengakses air dari sumber manapun sebanyak yang ia mau asalkan mampu secara tenaga tanpa persyaratan apapun. Setelah adanya pembangunan tandon dan pipanisasi, akses warga terhadap air bersih menjadi terbatas. Sebab adanya tata kelola air mengharuskan warga menjadi terikat oleh peraturan-peraturan yang dibentuk oleh pengurus air atau *ulu-ulu*. Masyarakat dipaksa untuk mengikuti aturan-aturan tersebut untuk dapat menikmati air bersih.

Penggunaan air hanya boleh menggunakan air mereka sebagai air minum dan memasak. Apabila tidak mengikuti aturan yang telah dibentuk maka konsekuensi-konsekuensi akan diterima oleh pelanggarnya, seperti pengurangan volume aliran air pada pipa konsumen, atau bahkan pemutusan aliran distribusi air secara sepihak oleh *ulu-ulu*. Sedangkan untuk kegiatan perayaan hari-hari besar seperti perayaan hajatan, maka mereka diharuskan membayar lebih,



mulai dari Rp. 50.000-Rp. 300.000 rupiah. Beberapa pengguna menambahkan seserahan untuk *ulu-ulu*, pada umumnya berupa beras, gula putih, rokok, serta makanan olahan dalam acara hajatan tersebut.

Kelemahan dalam Tata Kelola Air

1) Ketidak Jelasan dalam *Rekrutment* Pengurus

Pasca terjadi kekeringan pada tahun 2000 menyebabkan sumber-sumber di Desa Ampelan mulai bermunculan kembali, terutama Sumber Batu Putih yang berlokasi di perbatasan Desa Gubrih dan Desa Ampelan. Sumber tersebut merupakan sumber terbesar yang ada. Untuk mengatasi kerisauan atas desa mana yang berhak memiliki sumber mata air tersebut, maka pihak terkait seperti kepada Desa Gubrih dan Kepala Desa Ampelan serta tokoh masyarakat sekitar, sepakat bahwa air adalah milik bersama yang harus digunakan bersama untuk kesejahteraan bersama.

Maka dari itu kepengurusan dalam mengelola sumber daya air pun dipilih dengan jalan musyawarah oleh tokoh-tokoh masyarakat beserta perangkat desa. Orang yang terpilih menjadi pengelola ialah salah satu orang gubrih yang ditugaskan untuk mengontrol di pusat Sumber Batu Putih, dan empat orang dari Ampelan yang masing-masing ditugaskan untuk mengontrol saluran pipa di wilayah tengah atas, wilayah tengah bawah, serta wilayah Ampelan bawah. Musyawarah yang diadakan saat itu membahas tentang pemilihan *Ulu-ulu* oleh warga.

Pada tahun 2004/2005 Desa Ampelan mendapat bantuan pipa air lagi untuk menjalankan tata kelola air di Sumber Lengis. Sebagai mana pemilihan *Ulu-ulu* sebelumnya. Pada pemilihan *Ulu-ulu* di Sumber Lengis, juga ditunjuk satu warga yang dianggap sebagai tokoh masyarakat. Begitu pun pada pembangunan pipanisasi di tahun-tahun berikutnya, pemilihan dilakukan dengan diadakan MusDes, kemudian calon-calon tersebut dipilih kembali oleh masyarakat dengan cara *voting* suara terbanyak.



Berdasarkan keseluruhan pengurus yang dipilih, terlihat bahwa terdapat proses *rekruitment* yang kurang baik. Nampaknya tidak ada kejelasan tentang tugas sebagai *ulu-ulu* secara jelas seperti wilayah kerja yang harus diurus oleh *ulu-ulu*, tugas-tugas sebagai *ulu-ulu*, maupun tata cara membangun keberhasilan organisasi bahkan peraturan-peraturan yang ditentukan hanya bersifat lisan. Oleh sebab itu tidak ada aturan main yang jelas dan paten yang bisa dimengerti oleh pengguna maupun *ulu-ulu*. *Ulu-ulu* yang dipilih juga tidak dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan tentang batasan kekuasaannya secara jelas sehingga penghasilan yang didapatkan setiap *ulu-ulu* menjadi tidak jelas dan berbeda-beda. Memunculkan persaingan antar *ulu-ulu* untuk mendapatkan keuntungan paling besar serta saling serobot wilayah sesama *ulu-ulu*.

2) Ketidak Jelasan Struktur Organisasi

Meskipun kebanyakan pengurus distribusi air merupakan tokoh masyarakat, namun hal tersebut tidak menjamin kepengurusan dalam tata kelola air akan berjalan baik. Tata kelola air dilakukan oleh masyarakat yang minim Sumber Daya Manusianya, rata-rata ialah lulusan SD. Latar belakang pendidikan yang kurang memadai tersebut, dapat mempengaruhi pola kinerja pengurus. Berdasarkan data lapangan menunjukkan bahwa pengurus dipilih berdasarkan *voting* sedangkan struktur organisasinya tidak ditentukan, seperti penanggung jawab kegiatan organisasi ataupun penanggung jawab operasional organisasi tidak tertulis dengan jelas. Setiap pengurus yang dinobatkan sebagai *ulu-ulu* hanya sebatas lisan, sehingga tidak ada struktur organisasi secara tertulis. Kelemahan ini yang seolah-olah membuat pengurus tidak memiliki rasa keterikatan dengan tanggung jawab organisasi. Nampaknya komunikasi sesama *ulu-ulu* pada awal terbentuknya kepengurusan tata kelola pun kurang dijaga dengan baik. Tidak adanya struktur yang jelas ditambah dengan pengurusan tata kelola oleh orang SDM rendah, seolah mengubah orientasi *ulu-ulu* terhadap tugas-tugas *ulu-ulu* yang seharusnya melayani masyarakat sebagai distributor air, malah menjadikannya merasa menjadi pemilik yang boleh menguasai sumber daya air tersebut.

Konsekuensinya, dengan hal yang dimilikinya itu membuat pengurus *ulu-ulu* bebas mengambil keuntungan yang didapatkan, baik dari segi keuntungan materiil maupun keuntungan dari pertukaran sosial yang terjadi. Adanya pertukaran- pertukaran yang dianggap menguntungkan tersebut mendorong para penguasa berlomba untuk mendapatkan keuntungan



sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak *sportif*. Peneliti menemukan penyimpangan-penyimpangan tersebut, seperti kerusakan pipa yang sengaja dilakukan oleh *ulu-ulu* satu kepada *ulu-ulu* maupun konsumen *ulu-ulu* yang lainnya. Sehingga beberapa konsumen harus membayar kepada dua *ulu-ulu* dan jalannya distribusi air menjadi terhambat akibat kerusakan pipa. Tidak adanya sistem keamanan pada struktur tata kelola dengan jelas, mendorong penyimpangan-penyimpangan terus terjadi.

3) Ketidak Jelasan Pembagian Keuntungan

Mayoritas penduduk Ampelan memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak sapi. Pekerjaan sampingannya ialah membuat *sak ikan*, dimana maksimal satu KK hanya menghasilkan 100 biji dan hanya mendapatkan uang 11.000 paling mahal. Pendapatan warga Ampelan rata-rata (sangat minim), sehingga bagi sebagian *ulu-ulu* merasa menjadi pengurus *ulu-ulu* merupakan keuntungan yang dapat menambah pemasukan. Mereka tidak perlu bekerja keras tetapi pemasukan berjalan setiap bulan, kondisi ini yang menjadikan air sebagai komoditas berharga. Kondisi geografis Desa Ampelan yang berada di wilayah sulit air, ditambah sungai yang tidak mampu mencukupi *supply* air maka mereka harus membeli air dari *ulu-ulu*. Sejalan dengan hal itu posisi sebagai *ulu-ulu* merupakan hal yang sangat diinginkan, maka harus ditentukan pendapatan masing-masing *ulu-ulu*, pembagian wilayah yang jelas, serta menentukan aturan main yang jelas.

Terkadang demi mendapatkan pendapatan lebih, pengurus *ulu-ulu* memilih menolak untuk membagi pendapatannya dengan pihak Desa sebagai penampung organisasi *ulu-ulu*. Khususnya pada pernyataan informan berikut ini:

“Jadi orang kerja ini kan butuh makan, Misalnya kerja air kan orang harus makan air”.

Kebingungan dalam pembagian keuangan lah yang sering menjadi alasan pengurus, untuk tidak menyetor uang ke Balai Desa. Penyimpangan-penyimpangan berlatar belakang ekonomi lainnya ialah, munculnya kebijakan-kebijakan baru oleh beberapa *ulu-ulu* yakni, penarikan uang *ngamprah* yang berbeda pada setiap pengguna, dimana orang yang berstatus ekonomi tinggi maka ditarik dengan harga lebih tinggi. Untuk pengguna yang memiliki



kedekatan sosial dengan *ulu-ulu* maka jatah air yang diberikan akan lebih banyak. Selain itu, beberapa *ulu-ulu* masih meminta uang tambahan yang mereka sebut sebagai uang rokok pada saat memasang pipa pertama. Pada beberapa kasus saat ada pipa warga yang rusak mereka masih meminta uang untuk membeli pipa padahal setiap bulannya konsumen selalu rutin membayar untuk iuran keamanan, perawatan, dan kerusakan. Pembagian keuntungan pun juga tidak jelas, mendorong *ulu-ulu* untuk saling sikut menyikut dalam mengumpulkan konsumen sebanyak-banyaknya, bahkan beberapa *ulu-ulu* memilih mengundurkan diri sebagai *ulu-ulu* ketimbang berebut dengan pengurus lainnya. Hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan lemahnya keterikatan dalam tata kelola air saat itu sehingga membuat *ulu-ulu* tidak bisa berkerja dalam kelompok. Tata kelola yang lemah dalam sebuah kepengurusan *management* air seolah mendorong pertukaran-pertukaran sosial menjadi muncul. Terjadinya pertukaran sosial inilah yang kemudian menguatkan *ulu-ulu* untuk mempertahankan posisinya.

Bentuk pertukaran dalam tata kelola air

Dalam subbab ini peneliti menjelaskan tentang beberapa pertukaran yang terbentuk dan sengaja dibentuk untuk mempertahankan relasi yang ada demi keuntungan masing-masing pihak, baik konsumen air maupun pengurus air. Begitu juga pertukaran Homans yang bisa dikatakan pertukaran hanya jika pertukaran dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sebagaimana garis besar dari teori pertukaran George C. Homans bahwasannya dalam sebuah relasi seseorang akan selalu mempertimbangkan untung dan rugi yang tidak melulu berbentuk hal materiil maupun juga hal imateriil. Berikut rincian macam-macam pertukaran sosial dalam tata kelola air di Desa Ampelan:

A. Pertukaran Air dengan Dukungan Sosial

Sebagai bagian dari masyarakat, tentunya seseorang akan memasuki jaringan sosial yang luas yang terbentuk atas hubungan individu-individu. Suatu hubungan akan terjalin semakin kuat khususnya kepada orang yang dianggap penting dalam hidupnya seperti hubungan antar tetangga, hubungan kekerabatan, maupun hubungan pertemanan. (Hartup, 1992) dalam buku Psikologi Relasi Sosial menjelaskan bahwa keberhasilan dalam menjalin pertemanan akan menjamin keberhasilan dalam membangun relasi sosial selanjutnya.



Manusia membutuhkan dukungan sosial untuk mendorongnya melakukan sesuatu atau mempertahankan sesuatu. Sebagaimana menurut Maslow yang mengungkapkan bahwa manusia juga membutuhkan aktualisasi diri yaitu “pengembangan diri yang seutuhnya dengan menggunakan keunikan bakat, potensi dan kemampuan manusia” (Julia T. Wood, 2013. Halaman: 16). Menjalin pertemanan artinya telah memenuhi sebagian kecil kebutuhan manusia secara interpersonal sedangkan pengakuan akan aktualisasi diri bisa didapatkan dari penilaian orang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada setiap hubungan manusia selalu mempertimbangkan untung dan rugi, sejalan dengan teori George C. Homans tentang pertukaran pada manusia, yang diperkuat oleh penjelasan Aristoteles bahwa pada hakikatnya manusia menjalin pertemanan bertujuan untuk memperoleh kegunaan (*utility*), kesenangan (*pleasure*), serta untuk memperoleh kebaikan dan kebajikan (*goodness & virtue*)⁴. Seperti halnya *ulu-ulu* yang mempertahankan posisinya sebagai *ulu-ulu* karena posisi tersebut dapat membuatnya memenuhi kebutuhan interpersonalnya.

Pada data lapangan peneliti menemukan bahwa *ulu-ulu* yang mendapatkan dukungan sosial terhadap aktualisasi dirinya atas keberadaannya di tengah masyarakat, serta kemampuannya dalam mengelola air pipa, cenderung lebih mempertahankan posisinya. Jadi, dukungan serta tanggapan positif terhadap kemampuan *ulu-ulu* sebagai pengurus, mampu menjadi stimulus yang mendorong mereka untuk melanjutkan pertukaran dalam tata kelola air. Pada titik ini dia merasa, hanya dia yang bisa melakukan pekerjaan ini, dan kalau bukan dia siapa lagi. Pola pikir seperti itu semakin mendorong *ulu-ulu* untuk berkuasa atas tata kelola air serta segala aturan-aturan bagi konsumennya. Sedangkan *ulu-ulu* yang tidak mendapat dukungan sosial seolah eksistensi diri dan kewenangannya sudah ditiadakan dalam dunia sosial, sehingga cenderung merasa dirinya sudah tidak dianggap dan tidak lagi menemukan keuntungan dalam relasinya. Hal inilah yang mendorongnya untuk mengundurkan diri sebagai *ulu-ulu*.

Bentuk dukungan sosial selain pengakuan atas kemampuan diri *ulu-ulu* yaitu perlunya sebuah dukungan dengan menjalin relasi pertemanan. Sebagaimana pada fakta lapangan juga ditemukan bahwa faktor pendorong *ulu-ulu* untuk mempertahankan posisinya ialah karena adanya dukungan sosial dari pertemanan. Pertemanan membuat mereka dapat saling memberikan keuntungan yang diharapkan atau memperoleh *utility* dan *pleasure* dalam



hubungan tersebut. Berdasarkan hubungan pertemanan yang saling memberikan kemanfaatan tersebut menghasilkan suatu kelompok pertemanan informal yang berhasil mencapai tujuannya secara bersama. Tujuan tersebut yaitu pemerataan distribusi yang dapat terus berjalan lancar pada konsumen-konsumen mereka maupun kepada diri mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka bisa terhindar dari hukuman-hukuman yang mungkin muncul jika distribusi air tidak berjalan lancar.

B. Pertukaran Air dengan Hubungan Kekkerabatan

Tempat bersosialisasi dan berkomunikasi paling awal adalah keluarga, sehingga kehadiran keluarga sangat penting bagi kehidupan manusia. Selain keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, ada pula yang sering kita sebut sebagai saudara seperti paman, bibi, sepupu, dan seterusnya. Begitupun di Desa Ampelan, desa yang guyub, menjunjung asas persaudaraan dan saling tolong menolong. Tidak luput juga yang dilakukan oleh beberapa *ulu-ulu* di Desa Ampelan yang melakukan pertukaran air dengan hubungan kekerabatan. Para *ulu-ulu* ini memiliki prinsip bahwa selama bisa membantu saudaranya yang kesusahan maka akan dibantu.

Hasil analisis peneliti menemukan beberapa *ulu-ulu* yang dengan tulus dan tanpa paksaan mendedikasikan waktu luangnya untuk menjadi pengurus air agar kerabat serta saudara-saudaranya dapat menikmati air bersih. Motif tersebut dirasakan dapat memberikan kepuasan secara emosional bagi pelakunya. Keluar dari keterikatan organisasi nampaknya membuat *ulu-ulu* lebih leluasa dalam memberikan manfaat untuk keluarga dan kerabatnya. Pada proposisi rasionalitas menerangkan tentang seseorang akan terdorong untuk melakukan suatu tindakan atau tidak, dapat dilihat pada hubungan antara peluang sukses, dorongan, dan nilai, proposisi ini menjelaskan tentang mengapa aktor memberi nilai lebih pada ganjaran-ganjaran tertentu dari pada hadiah yang lain. Sejalan dengan teori Homans (dalam Ritzer & Goodman, 2003:367) bahwa struktur berskala luas hanya akan mampu dipahami, dengan memahami perilaku sosial mendasar seperti proses pertukaran ditingkat individual maupun kemasyarakatan, pertukaran tersebut bisa berupa pertukaran materi maupun non-materi.



Ulu-ulu memiliki motif pendorong tersendiri sehingga ia bersedia melanjutkan tugasnya sebagai pengurus air sampai saat ini, walaupun mereka sadar kerumitan-kerumitan menjadi pengurus air. Proposisi sukses menurut pandangan para *ulu-ulu* ini ialah menjadi berguna bagi keluarga dan kerabatnya sehingga terjalinlah suatu persaudaraan yang dapat saling membantu dalam kesusahan. Ganjaran yang diharapkan tersebut dapat dikategorikan sebagai ganjaran emosional yang bersifat *immaterial* atau ganjaran yang tak tampak, seperti rasa bangga atau wibawa tersendiri dimata keluarga sehingga dapat diterima ditengah keluarga dengan lapang.

C. Pertukaran Air dengan Privilege dalam Masyarakat

Homans (1961) dalam buku Psikologi Relasi Sosial mengungkapkan teorinya tentang pertukaran perilaku, menunjukkan perilaku individu yang cenderung menjalin hubungan dengan individu lain dianggap dapat memberikan keuntungan lebih besar dari pada kerugiannya. Selama keuntungan yang diberikan masih memiliki manfaat dalam keberlanjutan hidup individu, maka hubungan tersebut akan terus dipertahankan. Sebagaimana subbab ini menjelaskan macam pertukaran dalam tata kelola air di Desa Ampelan. Salah satunya ialah faktor *privilege* dalam masyarakat sebagai pendorong *ulu-ulu* untuk mempertahankan relasinya. Sebagaimana mestinya, manusia senantiasa melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus, mereka berupaya dengan melakukan berbagai kegiatan untuk memperoleh *value added* yang dapat dimanfaatkan dalam proses hidupnya (Fuad Amsyari, 1996:7).

Privilege atau hak istimewa tampaknya diberikan masyarakat pada beberapa *ulu-ulu*. Pada fenomena dilapangan, *ulu-ulu* termasuk dalam salah satu warga yang memiliki status sosial tinggi yang lebih dihormati oleh warga sekitar Ampelan. *Privilege* yang didapatkan oleh *ulu-ulu* memang terlihat sederhana, seperti ketika beberapa warga pengguna yang memiliki hajatan sengaja memberi kue dan makanan saji untuk *ulu-ulu*, atau ketika si *ulu-ulu* membutuhkan uang untuk berhutang maka dengan mudah warga pengguna meminjamkan uang kepadanya, suatu waktu beberapa warga juga memberikan sebagian kecil hasil panennya untuk *ulu-ulu*. Hak istimewa itulah yang membuat *ulu-ulu* merasa dikhususkan, merasa menjadi orang istimewa sehingga mempertahankan pekerjaannya sebagai pengelola air pipa.



Walaupun banyak sebagian orang yang memandang pekerjaan *ulu-ulu* adalah (mengkomersilkan sumber daya) namun pada beberapa warga pengguna menganggap sebaliknya, seperti Ibu Yanti yang merupakan salah satu pengguna air pipa, beliau melihat *privilege* pantas diberikan kepada *ulu-ulu* setelah apa yang *ulu-ulu* kerjakan untuk kelancaran jalannya tata kelola air. Saat konsumen merasa biaya lebih besar daripada tindakan pengurus dalam mengelola air, maka ia akan berhenti mengeluarkan biaya untuk pengurus tersebut dan memilih berpindah kepada pengurus yang dirasa memiliki pertukaran yang adil. Serangkaian keuntungan yang diperoleh aktor memungkinkan perulangan terhadap perilaku sangat besar, sehingga relasi dapat terus berlangsung antara *ulu-ulu* dengan teman seprofesinya maupun dengan konsumennya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat pertukaran sosial dalam tata kelola air bersih di Desa Ampelan. Semua berawal dari tiga aktivitas yaitu (1) adanya pembuatan tandon pada sumber mata air dan pipanisasi, yaitu pembatasan penggunaan air bersih pada sumber mata air yang kemudian didistribusikan ke tandon-tandon *ulu-ulu* dengan menggunakan pipa, pada setiap tandon yang tersebar terdapat *ulu-ulu* yang mengelola dan pengelolaan terhadap sumber ini telah sepenuhnya diserahkan kepada *ulu-ulu*. Hal tersebut menciptakan perubahan orientasi *ulu-ulu* terhadap tugasnya yang seharusnya melayani masyarakat pengguna malah menjadikan air seolah miliknya. (2) pembayaran iuran dan *ngamprah*, yaitu salah satu persyaratan yang harus dipenuhi setiap warga untuk menikmati air bersih layak minum di Desa Ampelan. (3) adanya syarat-syarat bagi konsumen air pipa. Adanya aktivitas tersebut menjadikan warga Ampelan kehilangan kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya air. Setiap sumber mata air dan sumur bor langsung dibentuk kepengurusannya dalam wadah HIPPAM. Organisasi tersebut berjalan kurang dari 5 tahun, disebabkan oleh kelemahan dalam tata kelola air pada saat itu, dimana *rekrutment* pengurus hanya dipilih sebatas lisan, tidak ada struktur yang jelas serta ketidakjelasan pembagian keuntungan.

Berdasarkan kelemahan itu membuat pengurus tidak bisa bekerja dalam kelompok dan tata kelola air menjadi semakin tidak terkendali oleh pemerintah Desa. Hal tersebut sesuai dengan yang telah dijelaskan berulang kali dalam pembahasan bab-bab sebelumnya bahwa prinsip



pertukaran oleh George C. Homans adalah mencari untung dan menghindari kerugian-kerugian, keuntungan tidak selalu berupa materiil atau sesuatu yang tampak tetapi bisa juga berupa imateriil yaitu keuntungan yang tidak tampak oleh orang lain tapi bisa dirasakan oleh penerima dan ketika *reward-reward* yang diharapkan tidak didapatkan maka kemungkinan perulangan terhadap tindakan tersebut menjadi kecil atau bahkan tidak ada perulangan.

Meskipun dengan tata kelola yang sederhana, faktanya pola yang demikian berjalan ± 16 tahun lamanya, hal ini dikarenakan adanya hubungan pertukaran antara air dengan sosial antara *ulu-ulu* dengan konsumen, dan *ulu-ulu* dengan sesama *ulu-ulu*, yaitu (1) pertukaran air dengan dukungan sosial; (2) pertukaran air dengan hubungan kekerabatan; (3) pertukaran air dengan privilege dalam masyarakat. Nampaknya pertukaran yang terjadi lebih menguntungkan bagi *ulu-ulu* namun demikian, masyarakat pengguna bisa mendapatkan air dalam jangka panjang. Tidak semua pertukaran harus benar-benar seimbang secara sempurna dengan perbandingan 50:50, karena setiap orang memiliki definisi dan nilai kepuasannya masing-masing sehingga bagi pihak yang berelasi merasa saling diuntungkan.



References*

- Amsyari, Fuad. 1996. "Membangun Lingkungan Sehat: Menyambut 50 Tahun Indonesia Merdeka". Surabaya: Airlangga University Press.
- Bappenas. "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945" [Online].
<http://www.bappenas.go.id>. Diunduh pada 20 Agustus 2019.
- Islam, Shafiqul and Amanda C. Repella,. (2015). *Water Diplomacy: A Negotiated Approach to Manage Complex Water Problems*. Universities Council on Water Resources Journal of Contemporary Water Research & Education Issue 155, Pages 1-10, July 2015.
- Kittikhoun, A., Staubli, D.M., (2018). Water diplomacy and conflict management in the Mekong: from rivalries to cooperation, *Journal of Hydrology* (2018), doi: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.09.059>.
- Karima, Safer., (2014). *Water Management And Sustainable Development*. RJOAS, 11(35), November 2014
- Nurjaman, Tabah Aris dan Faturachman. 2018. "Psikologi Relasi Sosial". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2003. "Teori Sosiologi Modern". Jakarta: Prenada Media.
- Wood, Julia T. 2013. "Komunikasi Interpersonal Interaksi Keseharian". Jakarta: Salemba Humanika.

